

RENJA 2027

**DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**



Jl. Madureso Nomor 2 Temanggung Telepon/Faximili (0293) 491436 Kode Pos 56229
Surat Elektronik : dinkopdag@temanggungkab.go.id Laman : dinkopdag.temanggungkab.go.id

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2027

Disusun oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2027

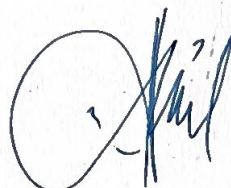
Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : 20 Juli 2026

Koordinator
Bidang Ekonomi SDA dan
Infrastruktur



Ir. GUNADI, MM
NIP. 196807212007011017

Petugas Verifikator,



DWI FATMA A, SE, M.Ec.Dev
NIP. 198106192005012016

Mengetahui,
KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,



Dr. HENDRA SUMARYANA, M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720324 1992031 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunianya sehingga Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027. Rencana Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2027. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan arahan dan landasan bagi seluruh penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi;
2. Memberikan pedoman dan acuan bagi pengukuran progres pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pembangunan;
3. Merupakan petunjuk atas target kinerja program dan kegiatan dalam lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung.

Semoga Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2027 bisa dijadikan pedoman dan acuan bagi pelaksanaan tugas-tugas pembangunan, sekaligus perwujudan amanat yang diemban oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 20 Juli 2026

Plt. KEPALA DINKOPDAG
KABUPATEN TEMANGGUNG,



MANDAKARTIKO, S.STP, M.Kom
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197904121997111002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR vi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 1.1 Latar belakang 1

 1.2 Landasan Hukum 7

 1.3 Maksud dan Tujuan 9

 1.4 Sistematika Penulisan..... 10

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH 11

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
 Menengah dan Perdagangan Tahun 2025 dan Capaian Renstra
 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
 Tahun 2025-2029..... 11

 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
 Menengah dan Perdagangan..... 24

 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
 Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan 37

 2.4 Telaah Pokok Pikiran DPRD 42

 2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 43

 2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 52

 2.7 Inovasi Perangkat Daerah 52

 2.8 Penghargaan 53

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN..... 54

 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 54

 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
 Menengah dan Perdagangan..... 54

 3.3 Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah
 dan Perdagangan..... 57

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN..... 88

 4.1 Program dan Kegiatan 88

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 94

 5.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2027..... 94

 5.2 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 94

BAB VI PENUTUP 96

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas
Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun
2025 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d
Triwulan I Tahun 2026 Kabupaten Temanggung 12

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah Kabupaten
Temanggung 25

Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah (IKK) Kabupaten
Temanggung 27

Tabel 2. 4 Telaah Pokok Pikiran DPRD Tahun 2027 42

Tabel 2. 5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 44

Tabel 2. 6 Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2024 - 2026..... 52

Tabel 2. 7 Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2024 - 2026 53

Tabel 3. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja Dinas
Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung Tahun 2027 55

Tabel 3. 2 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun
2027 58

Tabel 4. 1 Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Dinas
Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung Tahun 2027 89

Tabel 5. 1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 94

Tabel 5. 2 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan 2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

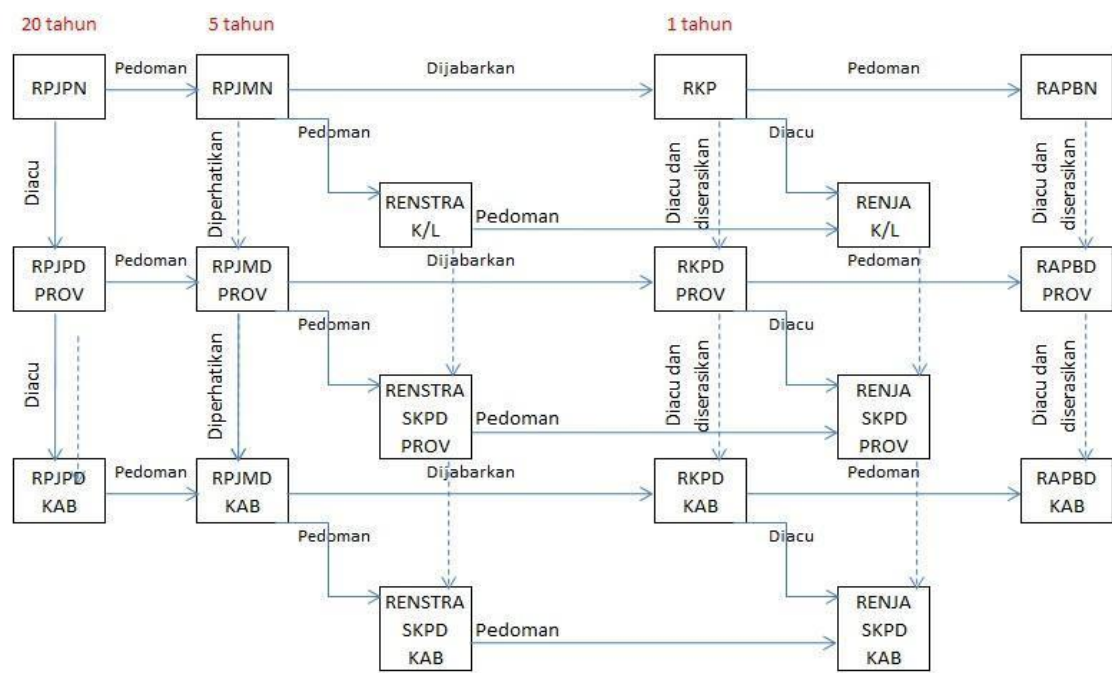
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2027 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2027.

Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2027 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2027 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2027 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
- 2) Kondisi pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
- 4) Data Pokok Pembangunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;

- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.

b. Analisis gambaran pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan untuk kondisi tahun 2025-2029;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV tahun 2025, dan realisasi tahun 2026 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2025;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinkopdag tahun lalu berdasarkan Renstra Dinkopdag;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan. Merumuskan suatu

kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

- 4) Evaluasi capaian kinerja bidang urusan berupa IKU dan IKK Tahun 2025;
- 5) Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025 (bagi urusan terkait).

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkopdag;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan

Perdagangan;

- 3) Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan

relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinkopdag;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;

Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan renja.

l. Pembahasan Forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dengan saran dan masukan dari *stakeholder* terkait dan tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
13. Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 24 Tahun 2026 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 39 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2027 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan untuk Tahun 2027 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2027 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2027 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan selama kurun waktu Tahun 2027;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2027;

- 4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2027; dan
- 5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2027.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
- BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
- BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VI PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2025 dan Capaian Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2025-2029.

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2027, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2025 terhadap capaian Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2025-2029, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2026. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan sampai dengan tahun berjalan terhadap target yang telah ditentukan.

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2025-2029 telah dapat dilakukan dengan menggunakan capaian kinerja Tahun 2025 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan 2025-2029. Adapun hasil evaluasi sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2025 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Triwulan I Tahun 2026 Kabupaten Temanggung

No	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							K	Rp (DPA)	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7= 6/5	8	9	10	11	12=10/8
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang dilakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan	%	9,5	41,21	100	12,25	12.500.000	10,81	550.000	88,25
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota									
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	40	75	100	20	12.500.000	2	550.000	10
2	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pendidikan dan pelatihan koperasi		-	-	-	4,54	25.000.000	3,2258	0	71,05

No	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							K	Rp (DPA)	K	Rp	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi									
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian		-	-	-	15	25.000.000	0	0	0
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi. pendampingan usaha. kemitraan usaha. pengembangan kelembagaan. akses pembiayaan	%	0,15	0,24	100	0,25	1.602.339.375	0,26	0	100
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro									
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro		-	-	-	20	68.139.375	0	0	0

No	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							K	Rp (DPA)	K	Rp	
	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	1	1	100	30	1.534.200.000	0	0	0
4	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	(renstra terbaru indikator & program ini dihapus)									
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan SDM, dan/Kegiatan Lainnya									
	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	90	110	100	-	-	-	-	-
	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan					100	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan				2,50
					Predikat	Sangat Tinggi				Predikat	Sangat Rendah
	Rata-rata Capaian Kinerja Program					100	Rata-rata Capaian Kinerja Program				86,43
					Predikat	Sangat Tinggi				Predikat	Tinggi

No	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							K	Rp (DPA)	K	Rp	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										
5	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik	%	67	67	100	67	1.922.301.500	67	0	100
		Presentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital	%	1,85	1,92	100	2		1,92		96
		Presentasi Pelaku Usaha Informal yang difasilitasi	%	6,85	11,31	100	6,85		7,61		100
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan									
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	6	6	100	6	1.911.000.000	0	0	0
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Tersedianya pasar kondisi baik dan tempat untuk fasilitasi pelaku usaha informal									
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		-	-	-	1	11.301.500	0	0	0

No	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							K	Rp (DPA)	K	Rp	
6	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Ketersediaan informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	%	90	100	100	90	41.198.500	24,66	1.186.000	27,4
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota										
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	laporan	273	365	100	365	34.247.500	90	1.186.000	24,66
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan	12	12	100	12	6.951.000	0	0	0
7	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor	%	-	-	-	126.276.147	175.000.000	14.875.493	0	11,78

No	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							K	Rp (DPA)	K	Rp	
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya pelaku usaha yang berorientasi ekspor pada pelaksanaan misi dagang									
	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku usaha	-	-	-		150.000.000	0	0	0
	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku usaha	-	-	-		25.000.000	0	0	0
8	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang	%	95,00	88,85	93,53	95,00	17.500.000	6,52	1.280.000	6,86
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku									

No	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							K	Rp (DPA)	K	Rp	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	6000	5331	89,37	6000	17.500.000	391	1.280.000	6,52
					Rata- rata Capaian Kinerja Kegiatan	97,34				Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan	4,45
					Predikat	Sangat Tinggi				Predikat	Sangat Rendah
					Rata- rata Capaian Kinerja Program	98,71				Rata-rata Capaian Kinerja Program	57,01
					Predikat	Sangat Tinggi				Predikat	Rendah
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	100	100	100	6.448.072.006	25	2.498.342.348	25
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							888.139.478			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	24	24	100	24	888.139.478	4	2.427.671.398	16,67
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							200.000.000			

No	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							K	Rp (DPA)	K	Rp	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	200	400	100	200	200.000.000	0	3.583.350	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah							243.500.000			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100	12	9.500.000	0	0	0
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100	12	120.000.000	3	62.313.100	25
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	100	12	52.250.000	3	3.222.500	25
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100	12	61.750.000	3	1.552.000	25
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Unit	3	0	0					
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							4.629.026.278	0		

No	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							K	Rp (DPA)	K	Rp	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100					
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100	12	731.500.000	3	168.756.700	25
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100	12	3.897.526.278	3	949.597.869	25
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan BMD						487.406.250			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	2	100	2	73.743.750	1	6.282.400	50
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		40	40	100	40	12.350.000	0	0	0
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	43	43	100	43	334.812.500	2	31.576.596	4,65

No	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							K	Rp (DPA)	K	Rp	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3	100	1	66.500.000	0	0	0
	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan					92,86	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan				16,36
					Predikat	Sangat Tinggi				Predikat	Sangat Rendah
	Rata-rata Capaian Kinerja Program					100,00	Rata-rata Capaian Kinerja Program				25,00
					Predikat	Sangat Tinggi				Predikat	Sangat Rendah

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung, 2026

Dari Tabel 2.1. evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan di tahun 2025 maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan berupa:

1. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:
 - a. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) – Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik
 - b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan – Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting – Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
 - d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Realisasi program/kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:
 - a. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi - sub kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Program Pengembangan UMKM – Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro
 - c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting – Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
3. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:
 - a. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen – Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
4. Faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan adalah sebagai berikut:
 - a. Faktor Pendorong :
 - Koperasi yang tergolong aktif selalu melaporkan laporan keuangan tepat waktu

- Koperasi sudah dapat melaksanakan self assesment (penilaian mandiri) sehingga JFPK hanya mengcroscek sudah sesuai dengan peraturan belum.
- Biaya pendaftaran merek yang lebih ringan bagi pelaku usaha yang memiliki Surat Keterangan UMKM Binaan dari Dinas mendorong antusiasme pelaku usaha untuk mengajukan fasilitasi
- Adanya peningkatan anggaran untuk pemeliharaan rutin Pasar Daerah
- Adanya dukungan dari pedagang untuk menjaga sarana prasarana Pasar Daerah
- Fasilitasi sarana dan prasarana bagi petugas input berupa Smart Phone dan kuota internet untuk mendukung kelancaran pelaporan hasil pemantauan harga.

b. Faktor Penghambat :

- Kurang sadarnya para wajib tera untuk menera/tera ulangkan alat UTTP-nya
- Anggaran kegiatan tera/tera ulang yang berkurang / diefisiensi
- Belum adanya anggaran untuk kegiatan pengawasan di bidang kemetrolagian

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah dan Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Berdasarkan realisasi capaian kinerja program dan kegiatan tahun 2025, terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang realisasinya masih dibawah target yaitu sub kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang. Di tahun 2025, masih terdapat 669 alat ukur yang belum ditera ulang. Pada tahun 2026 s.d Triwulan I, alat ukur yang ditera ulang sebanyak 391. Upaya yang telah dilakukan agar di tahun 2026 target dapat tercapai yaitu :

- a. Melakukan sosialisasi kepada wajib tera melalui platform digital
- b. Memaksimalkan penggunaan anggaran dalam kegiatan tera/tera ulang
- c. Tera/tera ulang dengan metode jemput bola
- d. Melakukan Update data potensi UTTP

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2025, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori Sangat Tinggi yaitu dengan nilai 93,54%, Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB
 - Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB = 78,69% (Tinggi)
2. Meningkatnya Jumlah Wirausaha di Daerah
 - Rasio Kewirausahaan Daerah = 89,01% (Tinggi)
3. Meningkatnya Nilai Usaha Perdagangan
 - Disparitas Harga = 100% (Sangat Tinggi)
4. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik
 - Nilai IKM Perangkat Daerah = 100% (Sangat Tinggi)
 - Nilai AKIP Perangkat Daerah = 100% (Sangat Tinggi)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

2.1.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dibagi menjadi Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kunci. Adapaun penjelasan masing-masing indikator tercantum pada tabel 2.2 -2.5 sebagai berikut:

Tabel. 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja						Realisasi Kinerja		Capaian s.d TW I 2026	Skala Nilai Peringkat Kinerja
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI. USAHA KECIL. DAN MENENGAH												
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)												
1	Nilai IKM Perangkat Daerah	Angka	87,30	87,60	87,90	88,20	88,50	88,80	89,69	89,69	100	Sangat Tinggi
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	72,55	72,80	73,10	73,40	73,70	74,00	72,55	72,55	99,66	Sangat Tinggi
3	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	%	1,83	1,88	1,89	1,93	2,01	2,03	1,44	1,19	63,23	Rendah
4	Rasio Kewirausahaan daerah	%	2,73	3,15	3,28	3,41	3,49	3,61	2,43	2,43	77,14	Tinggi
INDIKATOR PROGRAM												
1	Persentase koperasi yang dilakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan	%	9,50	12,25	21,25	27,27	37,25	37,50	41,21	10,81	88,25	Tinggi
2	Persentase pendidikan dan pelatihan koperasi	%	3,70	4,54	15,15	16,50	17,50	18,50	31,34	3,22	71,05	Sedang
3	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi. pendampingan usaha. kemitraan usaha. pengembangan kelembagaan. akses pembiayaan	%	0,15	0,25	0,38	0,42	0,47	0,51	0,239	0,26	100	Sangat Tinggi
JUMLAH IKUPD		4	RATA RATA CAPAIAN IKUPD								85,01	
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM		3	RATA RATA CAPAIAN PROGRAM								86,43	

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja						Realisasi Kinerja		Capaian s.d TW I 2026	Skala Nilai Peringkat Kinerja
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
JUMLAH INDIKATOR BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		7	RATA RATA CAPAIAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								85,72	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN												
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)												
1	Rasio PDRB sektor perdagangan	%	20,05	21	20,98	20,96	20,94	20,93	21,05	20,78	98,95	Sangat Tinggi
2	Disparitas Harga	%	±10	±10	±10	±10	±10	±10	0,30	0,35	100	Sangat Tinggi
INDIKATOR PROGRAM												
1	Persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik	%	67	67	83	83	83	83	66,67	66,67	99,50	Sangat Tinggi
2	Persentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital	%	1,85	2	2,4	2,8	3,2	3,6	1,92	1,91	95,76	Sangat Tinggi
3	Persentase Pelaku Usaha Informal yang difasilitasi	%	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	11,31	7,61	100	Sangat Tinggi
4	Persentase Ketersediaan informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	%	90	90	90	90	90	90	100	24,66	27,40	Sangat Rendah
5	Nilai Ekspor	US\$	121.419.372	126.276.147,00	131.327.193	136.580.281	142.043.492	147.725.232	110.071.498	14.875.493	11,78	Sangat Rendah
6	Cakupan alat ukur. takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang	%	95	95	95	95	95	95	88,85	6,52	6,86	Sangat Rendah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja						Realisasi Kinerja		Capaian s.d TW I 2026	Skala Nilai Peringkat Kinerja
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	JUMLAH IKUPD	2	RATA RATA CAPAIAN IKUPD								99,48	
	JUMLAH INDIKATOR PROGRAM	6	RATA RATA CAPAIAN PROGRAM								56,88	
	JUMLAH INDIKATOR BIDANG PERDAGANGAN	8	RATA RATA CAPAIAN BIDANG PERDAGANGAN								78,18	

JUMLAH TOTAL IKUPD	6	RATA RATA CAPAIAN IKUPD									92,24	
JUMLAH TOTAL INDIKATOR PROGRAM	9	RATA RATA CAPAIAN PROGRAM									71,66	
JUMLAH TOTAL INDIKATOR DINKOPDAG	15	RATA RATA CAPAIAN DINKOPDAG									81,95	

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung, 2026

Tabel. 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah (IKK) Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja						Realisasi Kinerja		Capaian s.d tw 1 2026	Skala Nilai Peringkat Kinerja
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI. USAHA KECIL. DAN MENENGAH												
1	Persentase Koperasi yang berkualitas	%	13,83	14,13	14,38	14,88	15,18	15,48	Indikator lama (tidak digunakan)			
2	Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha		0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1				
1	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	Indikator baru sehingga target belum ada di RPJMD						4,94		Tidak bisa dihitung karena target belum ada di RPJMD	
2	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%							83,03			
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN												
1	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	95	95	95	95	95	95	88,85	6,52	6,86	Sangat Rendah

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung, 2026

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB

Rasio volume usaha koperasi adalah total nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu, bisa dikatakan pula volume usaha koperasi adalah seluruh transaksi ekonomi atau kegiatan operasional yang dilakukan koperasi dalam periode tertentu biasanya dalam satu tahun buku yang mencerminkan skala aktivitas ekonomi koperasi tersebut. Volume usaha koperasi sampai dengan tahun 2026 triwulan I yaitu sebanyak Rp. 370.962.794.977,-. Dibandingkan dengan PDRB Kabupaten Temanggung yaitu sebanyak Rp. 31.204.370.000.000,-, rasionya masih cukup kecil. Berikut Faktor pendorong, penghambat, dan tindak lanjut agar indikator dapat tercapai :

- Faktor Pendorong : Koperasi yang tergolong aktif selalu melaporkan laporan keuangan tepat waktu
- Faktor Penghambat : Terdapat beberapa koperasi yang tidak membuat laporan keuangan dan tidak dikirimkan ke Dinkopdag sehingga tidak dapat dihitung volume usaha koperasi tersebut
- Rekomendasi Tindaklanjut : Mensosialisaikan cara pembuatan laporann keuangan koperasi sesuai dengan Permenkop

2. Rasio Kewirausahaan Daerah

Rasio Kewirausahaan dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah penduduk yang berusaha dibantu buruh tetap dengan jumlah angkatan kerja, menggunakan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Temanggung. Data BPS untuk periode Triwulan I Tahun 2026 belum tersedia, sehingga angka yang tercantum masih mengacu pada data Triwulan IV Tahun 2025 yaitu sebesar 2,43. Target rasio kewirausahaan daerah di tahun 2026 yaitu 3,15 sehingga indikator rasio kewirausahaan daerah masih

belum tercapai. Berikut Faktor pendorong, penghambat, dan tindak lanjut agar indikator dapat tercapai :

- Faktor Pendorong : Adanya pelatihan dan peningkatan keterampilan berkaitan dengan kewirausahaan
- Faktor Penghambat : Ilmu yang diperoleh dari pelatihan tidak diaplikasikan dan Sumber daya yang terbatas untuk memberikan pendampingan lanjutan secara rutin
- Rekomendasi Tindaklanjut : Melakukan pendampingan secara online untuk memberikan arahan dan menjawab pertanyaan

3. Nilai IKM Perangkat Daerah

Nilai IKM adalah hasil kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan public. Data tahun 2026 masih menggunakan data tahun 2025 dikarenakan data belum publish. Berikut faktor pendorong dan penghambat tercapainya indikator tersebut :

- Faktor Pendorong : Masyarakat antusias berpartisipasi aktif dalam pengisian survei IKM
- Faktor Penghambat : Nilai IKM naik /turun setiap tahun karena tema yang di angkat berbeda tiap tahun antara survei tera ulang dan rekomendasi bbm bersubsidi
- Rekomendasi Tindaklanjut : Memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat agar meningkatkan kepuasan masyarakat

4. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan penilaian yang dilakukan oleh Kementrian PAN dan RB atas capaian kinerja instansi pemerintah yang akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja instansi pemerintah pada tahun berikutnya. Nilai AKIP 2026 masih menggunakan angka tahun 2025 dikarenakan belum dilakukan pengukuran. Nilai AKIP Dinkopdag Tahun 2025 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024. Berikut faktor pendorong dan penghambat tercapainya indikator tersebut :

- Faktor Pendorong : Adanya koreksi dan saran perbaikan dari inspektorat melalui LHE AKIP
- Faktor Penghambat : Ada beberapa indikator yang belum mencapai target
- Rekomendasi Tindaklanjut : Melakukan evaluasi berkala guna mencapai target kinerja

5. Disparitas Harga

Disparitas harga adalah perbedaan harga atas suatu harga komoditas barang kebutuhan pokok tertentu antar daerah. Semakin kecil nilai disparitas berarti semakin kecil perbedaan harga komoditas di Kabupaten Temanggung dengan harga di Provinsi untuk komoditas yang sama. Disparitas Harga di Tahun 2026 yaitu 0,35 sedangkan targetnya yaitu 10. Hal ini menunjukkan Disparitas Harga Kabupaten Temanggung di Tahun 2026 sudah tercapai. Berikut faktor pendorong, penghambat, dan tindak lanjut agar indikator tetap tercapai :

- Faktor Pendorong : Ketersediaan (stok) barang kebutuhan pokok yang cukup
- Faktor Penghambat : Fluktuasi Harga Barang Kebutuhan Pokok terutama komoditas yang tidak tahan lama dan produksinya banyak dipengaruhi oleh cuaca
- Rekomendasi Tindaklanjut : Menjaga stabilisasi harga barang kebutuhan pokok melalui Operasi Pasar/Gerakan Pangan Murah

B. INDIKATOR PROGRAM

1. Persentase koperasi yang dilakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan

Persentase Koperasi yang dilakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan dihitung menggunakan rumus: Jumlah Koperasi yang dilakukan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan koperasi pada periode tertentu dibagi koperasi aktif. Pada tahun 2025 Triwulan IV Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Temanggung telah melakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan terhadap 75 Koperasi di wilayah Kabupaten Temanggung.

Sedangkan untuk tahun 2026 Triwulan I baru melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan koperasi sebanyak 20 Koperasi. Berikut faktor pendorong, penghambat, dan rekomendasi tindak lanjut agar indikator dapat tercapai :

- Faktor Pendorong : Koperasi sudah dapat melaksanakan self assesment (penilaian mandiri) sehingga JFPK hanya mengcroscek sudah sesuai dengan peraturan belum.
- Faktor Penghambat : Belum semua pengurus melakukan self assesment (penilaian mandiri) sehingga tidak mengetahui termasuk peringkat apa koperasi yang dikelola.
- Rekomendasi Tindaklanjut : Sosialisasi pentingnya self assesment bagi koperasi

2. Persentase pendidikan dan pelatihan koperasi

Persentase pendidikan dan pelatihan koperasi didapatkan dari rumus jumlah pengurus, pengawas, pengelola dan anggota yang ditugaskan koperasi untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dibagi jumlah koperasi aktif dikali 100 %. Persentase pendidikan dan pelatihan koperasi di Kabupaten Temanggung s.d Triwulan I Tahun 2026 yaitu sebesar 3,23 sedangkan target di Tahun 2026 yaitu 4,54. Berikut faktor pendorong, penghambat, dan rekomendasi tindak lanjut agar indikator dapat tercapai :

- Faktor Pendorong : Terdapat dana dekon dari Provinsi sehingga pelatihan bagi pengurus KDKMP dapat dilaksanakan
- Faktor Penghambat : Kurangnya Anggaran untuk pelatihan bagi pengurus/pengawas KDKMP dan pelatihan bagi koperasi selain KDKMP
- Rekomendasi Tindaklanjut : Mengajukan permohonan anggaran untuk pelatihan Koperasi dan Pelatihan bagi pengurus KDKMP

3. Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi. pendampingan usaha. kemitraan usaha. pengembangan kelembagaan. akses pembiayaan

Pada Triwulan I tahun 2026 terdapat 88 pelaku usaha yang mendapat fasilitasi. Adapun fasilitasi yang diberikan antara lain penerbitan surat keterangan UMKM Binaan yang

digunakan dalam proses pengajuan sertifikasi Merek. Berikut faktor pendorong, penghambat, dan rekomendasi tindak lanjut agar indikator dapat tercapai :

- Faktor Pendorong : Biaya pendaftaran merek yang lebih ringan bagi pelaku usaha yang memiliki Surat Keterangan UMKM Binaan dari Dinas mendorong antusiasme pelaku usaha untuk mengajukan fasilitasi
- Faktor Penghambat : Minimnya kesadaran dan pemahaman pelaku usaha mikro terkait pentingnya sertifikasi merek dan program fasilitasi yang tersedia serta keterbatasan SDM pelaksana di bidang UKM untuk menjangkau seluruh sasaran secara bersamaan
- Rekomendasi Tindak lanjut :
 - a) Menggandeng komunitas UMKM untuk menyebarkan informasi program fasilitasi.
 - b) Rutin membagikan informasi kegiatan yang diselenggarakan pihak eksternal, baik sosialisasi maupun pelatihan, luring maupun daring.
 - c) Pelaksanaan kegiatan pelatihan yang direncanakan antara Triwulan 2 dan 3

4. Persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik

Pasar Daerah dalam kondisi baik sampai dengan tahun 2026 Triwulan I terdapat 4 pasar yaitu Pasar Candiroto, Pasar Ngadirejo, Pasar Legi Parakan, dan Pasar Temanggung. 4 Pasar tersebut sebelumnya sudah mengalami revitalisasi pasar dan perawatan rutin setiap tahunnya, namun kondisi bangunan dan prasarana di Pasar Pingit, dan Pasar Kraggan masih belum optimal karena belum pernah dilakukan revitalisasi pasar meskipun telah dilakukan perawatan rutin setiap tahunnya. Berikut faktor pendorong, penghambat, dan rekomendasi tindak lanjut agar indikator dapat tercapai :

- Faktor Pendorong : Adanya peningkatan anggaran untuk pemeliharaan rutin Pasar Daerah serta adanya dukungan dari pedagang untuk menjaga sarana prasarana Pasar Daerah
- Faktor Penghambat : belum adanya revitalisasi secara menyeluruh untuk Pasar Daerah yang telah berumur serta

kondisi dan jumlah sarana prasarana di Pasar Daerah tidak memadai

- Rekomendasi Tindaklanjut : Melaksanakan pemeliharaan Sarana Prasarana Pasar Daerah berdasarkan skala prioritas kerusakan

5. Persentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital

Pada tahun 2026 triwulan I pedagang Pasar Daerah yang telah menggunakan transaksi digital dalam transaksi jual-beli adalah sebesar 1,92%. Data ini masih sama dengan tahun 2025 karena belum ada penambahan pedagang yang menggunakan transaksi digital. Berikut faktor pendorong, penghambat, dan rekomendasi tindak lanjut agar indikator dapat tercapai :

- Faktor Pendorong : Dukungan dari perbankan untuk fasilitasi penggunaan aplikasi dan Qris dalam transaksi digital dan meningkatnya pemakaian transaksi non tunai oleh pengunjung Pasar Daerah
- Faktor Penghambat : Jaringan internet di beberapa lokasi Pasar Daerah tidak stabil dan kurang memadai
- Rekomendasi Tindaklanjut :
 - a) Melakukan sosialisasi untuk penggunaan platform marketplace dalam transaksi digital
 - b) Bekerja sama dengan Perbankan untuk memfasilitasi pembuatan Qris secara gratis
 - c) Membuat promosi melalui sosial media yang ada di Pasar Daerah

6. Persentase Pelaku Usaha Informal yang difasilitasi

Pedagang Usaha Informal adalah pedagang yang melakukan kegiatan usaha yang tidak memiliki tempat usaha yang tetap/permanen dan biasanya berpindah – pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Pada Triwulan I Tahun 2026 terdapat Pelaku Usaha Informal Pasar Tiban yang berlangsung 9 hari lebih singkat dari tahun sebelumnya. PKL Pasar Tiban ini bersifat temporer dan hanya berlangsung sementara mulai tanggal 11 – 19 Maret 2026 (2 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri Tahun 1447 H/2026 M). walaupun berlangsung lebih singkat, tetapi Jumlah Pelaku Usaha Informal yang difasilitasi

sudah sebanyak 111 pelaku usaha dan telah memenuhi target 2026. Berikut faktor pendorong, penghambat, dan rekomendasi tindak lanjut indikator dapat tercapai :

- Faktor Pendorong : PKL merupakan usaha kecil yang diminati masyarakat kelas bawah dan sangat membantu ekonomi kelas bawah, mudah dijalankan dan tidak memerlukan modal yang besar, sarana sederhana, perputaran ekonomi cepat karena mayoritas berupa usaha kuliner
- Faktor Penghambat : Pemerintah belum menyediakan tempat yang layak, perkembangan jumlah PKL tidak sebanding dengan fasilitasi yang dilakukan pemerintah, sebagian besar belum membentuk kelompok/paguyuban sehingga sulit dikoordinasikan dan dikendalikan, Pemkab.belum menyusun regulasi yang sesuai dengan perkembangan kondisi di lapangan, belum adanya kegiatan pembinaan (termasuk pendataan) secara rutin dan kontinyu karena tidak adanya biaya operasional
- Rekomendasi Tindaklanjut : Bekerja sama dengan UPT Pasar dalam hal pembinaan PKL (termasuk di dalamnya pendataan), mendorong para PKL untuk membentuk kelompok/paguyuban yang dilakukan bersamaan dengan OPD lain melakukan kegiatan (seperti pada saat Dinas Satpol PP mengadakan Sosialisasi Ketertiban), bekerja sama dengan OPD terkait mengusulkan penyusunan regulasi zonasi PKL

7. Persentase Ketersediaan informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting

Ketersediaan Informasi harga adalah tersedianya informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting sesuai dengan tingkat konsumsi yang dibutuhkan masyarakat dalam waktu tertentu. persentase ketersediaan informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting Tahun 2026 sampai dengan Triwulan I sebesar 24,66%. Capaian masih rendah dikarenakan data baru sampai Triwulan I. Data akan bertambah di Triwulan II, III, dan IV. Berikut faktor pendorong dan rekomendasi tindak lanjut indikator dapat tercapai :

- Faktor Pendorong : Fasilitasi sarana dan prasarana bagi petugas input berupa Smart Phone dan kuota internet untuk mendukung kelancaran pelaporan hasil pemantauan harga.
- Rekomendasi Tindaklanjut : Meningkatkan koordinasi dengan petugas input UPT dan kontributor kabupaten untuk kelancaran ketepatan waktu pelaporan hasil pemantauan.

8. Nilai Ekspor

Nilai Ekspor s.d Triwulan I Tahun 2026 yaitu \$14.875.493. Nilai ini masih lebih rendah dari target Tahun 2026 yaitu \$126.276.147. Berikut faktor pendorong, penghambat, dan rekomendasi tindak lanjut agar indikator dapat tercapai :

- Faktor Pendorong :
 - a) Infrastruktur yang baik, seperti pelabuhan, transportasi dan teknologi informasi.
 - b) Stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
 - c) Kemampuan eksportir dalam menangkap peluang pasar.
- Faktor Penghambat : . Perubahan kebijakan perdagangan internasional atau kebijakan proteksionisme dari negara tujuan serta Ketidakstabilan kurs mata uang.
- Rekomendasi Tindaklanjut : Mendorong pelaku usaha untuk mengikuti kegiatan Pelatihan ekspor, Bussines Matching, dan kegiatan sejenis.

9. Cakupan alat ukur. takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, UPTD Metrologi Legal Kabupaten Temanggung telah melakukan tera/ tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) sebanyak 391 unit sehingga persentase ketercapaiannya sebesar 6,52%. Sampai akhir tahun 2026, target tera alat UTTP yaitu 6000. Capaian ini masih sangat rendah dibandingkan dengan target di akhir tahun. Berikut faktor pendorong, penghambat, dan rekomendasi tindak lanjut agar indikator dapat tercapai :

- Faktor Pendorong : Penghapusan biaya retribusi/pajak kegiatan tera/tera ulang, serta Adanya audit/monitoring pihak lain sehingga mendorong wajib tera melakukan kegiatan tera/tera ulang
- Faktor Penghambat :
 - a) Kurangnya kesadaran para wajib tera untuk menera/tera ulangkan alat UTTP-nya
 - b) Anggaran kegiatan tera/tera ulang yang berkurang / diefisiensi
 - c) Belum adanya anggaran untuk kegiatan pengawasan dan sosialisasi di bidang kemetrolagian
 - d) Jadwal tera ulang di TW I yang berfokus pada Tera Ulang Pompa Bahan Bakar SPBU
 - e) Migrasi penggunaan Timbangan Meja ke Timbangan Elektronik
- Rekomendasi Tindaklanjut :
 - a) Melakukan sosialisasi kepada wajib tera melalui platform digital
 - b) Memaksimalkan penggunaan anggaran dalam kegiatan tera/tera ulang
 - c) Tera/tera ulang dengan metode jemput bola
 - d) Melakukan Update data potensi UTTP

d) INDIKATOR KINERJA KUNCI

Dari 3 (tiga) Indikator yang ada, capaian IKK hanya dapat diukur pada 1 (satu) indikator yaitu Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku. Analisa ketercapaian serta faktor pendorong, penghambat, dan rekomendasi tindak lanjut telah disampaikan diatas pada point (c) no 9.

Terdapat perbedaan sebanyak 2 (dua) indikator antara IKK yang menjadi tanggungjawab Dinkopdag dan IKK di RPJMD dikarenakan adanya pembaruan indikator dari Kementerian Dalam Negeri yang mengharuskan penyesuaian agar selaras dengan ketentuan dan pedoman terbaru. Capaian 2 (dua) indikator baru tersebut belum dapat diukur dikarenakan target dari indikator baru belum tercantum

dalam RPJMD. Pengukuran capaian dapat dilakukan setelah dilakukan perubahan RPJMD untuk mengakomodasi target indikator dimaksud.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan s.d Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target. Maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dari 15 (lima belas) indikator terdapat 7 (tujuh) indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:
 - Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB
Hal ini disebabkan karena Ada beberapa koperasi yang tidak membuat laporan keuangan dan tidak dikirimkan ke Dinkopdag sehingga tidak dapat dihitung volume usaha koperasi tersebut
 - Rasio Kewirausahaan Daerah
Hal ini disebabkan karena Ilmu yang diperoleh dari pelatihan tidak diaplikasikan serta sumber daya yang terbatas untuk memberikan pendampingan lanjutan secara rutin
 - Persentase koperasi yang dilakukan pengawasan. pemeriksaan dan pembinaan
Hal ini disebabkan karena belum semua pengurus melakukan self assesment (penilaian mandiri) sehingga tidak mengetahui koperasi yang dikelola termasuk peringkat apa
 - Persentase pendidikan dan pelatihan koperasi
Hal ini disebabkan karena kurangnya Anggaran untuk pelatihan bagi pengurus/pengawas KDKMP dan pelatihan bagi koperasi selain KDKMP
 - Nilai Ekspor
Hal ini disebabkan karena ketidakstabilan kurs mata uang serta perubahan kebijakan perdagangan internasional atau kebijakan proteksionisme dari negara tujuan penghitungan baru sampai

Triwulan I. Dimungkinkan nilai ekspor akan bertambah di Triwulan selanjutnya

- Persentase Ketersediaan informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting

Hal ini disebabkan karena informasi baru disediakan sampai Triwulan I. Capaian akan bertambah di Triwulan selanjutnya.

- Cakupan alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang

Hal ini disebabkan karena tera baru dilaksanakan sampai dengan Triwulan I. Jadwal tera ulang di Triwulan I berfokus pada Tera Ulang Pompa Bahan Bakar SPBU. Sedangkan tera ulang di pasar dan tempat lainnya akan dilaksanakan di triwulan selanjutnya. Sehingga capaian akan bertambah di Triwulan selanjutnya.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, antara lain :

- Kurangnya daya saing koperasi dan UMKM, baik dari aspek kualitas produk, inovasi, produktivitas, maupun kemampuan memenuhi standar pasar
- Kurangnya kapasitas sumber daya manusia pengelola koperasi dan pelaku UMKM dalam aspek manajemen usaha, tata kelola, pemasaran, serta pemanfaatan teknologi digital
- Kurangnya kepatuhan koperasi terhadap regulasi, seperti pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT), penyampaian laporan, dan tata kelola kelembagaan.
- Fluktuasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok yang mempengaruhi stabilitas perdagangan dan daya beli masyarakat.
- Masih ditemukannya praktik perdagangan yang belum tertib, termasuk penggunaan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang belum sesuai ketentuan serta perlindungan konsumen yang belum optimal.
- Keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana, serta jumlah dan kompetensi aparatur dalam mendukung pelaksanaan program dan pengawasan di bidang koperasi, UMKM, dan perdagangan.
- Dampak perubahan kondisi ekonomi, inflasi, dan perkembangan pasar yang memengaruhi keberlangsungan usaha koperasi, UMKM, dan sektor perdagangan.

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah maupun pencapaian program nasional

Permasalahan yang dihadapi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan memberikan dampak terhadap pencapaian Visi Kabupaten Temanggung, yaitu **"Temanggung Sejahtera, Berkelanjutan, Mudah, Inklusif, dan Aman."** Rendahnya daya saing koperasi dan UMKM, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha, serta lemahnya tata kelola kelembagaan koperasi menghambat peningkatan produktivitas, penciptaan nilai tambah, dan pengembangan usaha. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya peningkatan pendapatan masyarakat dan kesempatan kerja, sehingga pencapaian masyarakat yang sejahtera belum dapat diwujudkan secara maksimal.

Permasalahan tersebut juga berpengaruh terhadap pelaksanaan misi **diversifikasi perekonomian untuk mewujudkan penghidupan yang stabil**. Rendahnya daya saing, keterbatasan kompetensi pelaku usaha, serta dinamika kondisi ekonomi mengakibatkan pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan struktur ekonomi lokal belum optimal.

Selanjutnya, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pelaku koperasi dan UMKM juga berimplikasi pada pencapaian misi **pemberdayaan melalui pendidikan dan kesehatan**, khususnya dalam aspek peningkatan kompetensi, keterampilan kewirausahaan, dan kemandirian ekonomi masyarakat. Pengembangan kapasitas yang belum merata menyebabkan sebagian pelaku usaha belum mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, perubahan pasar, maupun tuntutan persaingan usaha.

Di bidang perdagangan, fluktuasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok, serta belum optimalnya ketertiban perdagangan dan perlindungan konsumen, dapat memengaruhi stabilitas ekonomi daerah, daya beli masyarakat, dan kepastian berusaha. Kondisi tersebut berdampak terhadap terwujudnya daerah yang aman dan kondusif bagi kegiatan ekonomi, sekaligus mengurangi kemudahan masyarakat dalam memperoleh barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.

Sementara itu, keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana, serta kapasitas aparatur berpengaruh terhadap kualitas pelayanan

publik, pembinaan, pengawasan, dan pemberdayaan koperasi, UMK, dan pelaku perdagangan. Hal tersebut dapat menghambat upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pelayanan yang mudah, inklusif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Tantangan yang dihadapi antara lain masih rendahnya daya saing koperasi dan UMKM dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin kompetitif, baik di tingkat lokal maupun nasional. Kapasitas sumber daya manusia pelaku koperasi dan UMKM yang belum merata menyebabkan kemampuan dalam manajemen usaha, inovasi produk, pemasaran, dan pemanfaatan teknologi digital masih perlu ditingkatkan. Di sisi lain, kepatuhan koperasi terhadap tata kelola kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan juga belum optimal sehingga memengaruhi kualitas dan keberlanjutan kelembagaan koperasi.

Selain itu, tantangan juga muncul dari fluktuasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok yang dipengaruhi oleh dinamika perekonomian, distribusi barang, maupun faktor eksternal lainnya. Upaya mewujudkan perdagangan yang tertib, berkeadilan, dan memberikan perlindungan kepada konsumen juga masih memerlukan penguatan pengawasan dan pembinaan. Keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana, serta jumlah dan kompetensi aparatur turut menjadi tantangan dalam memperluas jangkauan pelayanan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Perubahan kondisi ekonomi yang berlangsung cepat juga menuntut perangkat daerah untuk lebih adaptif dalam merumuskan kebijakan dan strategi pelayanan.

Di balik berbagai tantangan tersebut, terdapat sejumlah **peluang** yang dapat dimanfaatkan. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi membuka kesempatan bagi koperasi dan UMKM untuk memperluas akses pemasaran, meningkatkan efisiensi usaha, dan memperluas jaringan kemitraan. Dukungan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengembangan koperasi, kewirausahaan, UMKM, perlindungan konsumen, dan stabilisasi perdagangan juga menjadi peluang untuk memperkuat pelaksanaan program dan kegiatan.

Potensi sumber daya lokal Kabupaten Temanggung, baik di sektor pertanian, industri kreatif, maupun produk unggulan daerah, merupakan modal penting untuk meningkatkan daya saing UMKM sebanyak 33.835 pelaku usaha melalui pengembangan produk bernilai tambah dan perluasan pasar. Keberadaan pasar rakyat sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat merupakan potensi yang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Penguatan pengelolaan pasar rakyat, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pasar, serta penataan perdagangan yang tertib dapat meningkatkan kenyamanan transaksi, memperkuat daya saing pasar rakyat, dan mendukung stabilitas distribusi barang kebutuhan pokok.

5. Formulasi isu-isu penting

Berdasarkan identifikasi permasalahan, tantangan, dan peluang dalam penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil, menengah, dan perdagangan, diperlukan beberapa rekomendasi dan catatan strategis sebagai dasar dalam perumusan program dan kegiatan prioritas selama periode perencanaan, yaitu:

- Meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM melalui penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan kewirausahaan, inovasi produk, serta fasilitasi sertifikasi, standardisasi, dan pemasaran produk unggulan daerah.
- Mengembangkan ekosistem usaha yang mendukung pertumbuhan UMKM melalui penguatan kemitraan dengan dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperluas akses pembiayaan, pendampingan usaha, dan akses pasar
- Mendorong transformasi koperasi yang sehat, modern, dan akuntabel melalui peningkatan kepatuhan terhadap tata kelola kelembagaan, pembinaan berkelanjutan, serta penguatan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Memperkuat stabilisasi perdagangan melalui pengendalian harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok, penguatan sistem distribusi, pemantauan perkembangan harga, serta sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pelaku usaha.

- Meningkatkan kualitas pengelolaan pasar rakyat melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, penataan lingkungan pasar yang bersih, aman, dan nyaman, serta penguatan fungsi pasar rakyat sebagai pusat distribusi dan penggerak ekonomi local
- Meningkatkan tertib niaga, perlindungan konsumen, dan kepatuhan terhadap metrologi legal melalui pembinaan, pengawasan, tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP), serta peningkatan kesadaran pelaku usaha dan masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam kegiatan perdagangan.
- Meningkatkan kapasitas kelembagaan perangkat daerah melalui penguatan kompetensi aparatur, optimalisasi pemanfaatan sumber daya, serta peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi program agar pelaksanaan pelayanan publik semakin efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap perkembangan kondisi ekonomi.

2.4. Telaah Pokok Pikiran DPRD

Kamus usulan kegiatan merupakan kelompok usulan permasalahan yang disusun dalam SIPD yang sudah disesuaikan dengan Bidang Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah dan Program Perangkat Daerah (Program prioritas yang yang tercantum dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029). Tujuan penyusunan Kamus kegiatan adalah untuk memastikan agar usulan kegiatan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sesuai dengan Bidang Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah dan Program Perangkat Daerah. Verifikasi yang dilakukan mulai dari User sekretariat DPRD sampai dengan user Perangkat daerah adalah untuk memastikan kembali bahwa usulan permasalahan/kegiatan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD telah sesuai dengan Bidang Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah dan Program Perangkat Daerah. Pada Tahun 2027, Dinkopdag Kabupaten Temanggung tidak mendapat usulan Pokir DPRD.

Tabel 2. 4
Telaah Pokok Pikiran DPRD Tahun 2027

BIDANG URUSAN	URAIAN PERMASALAHAN	OPD TUJUAN	PROGRAM
NIHIL			

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung, 2026

2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD telah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan. Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.5

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2027

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ketera ngan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
A	URUSAN KOPERASI DAN UMKM					14.765.942.312	A	URUSAN KOPERASI DAN UMKM					14.765.942.312	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Temang gung	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	14.445.942.312	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Teman ggung	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	14.445.942.312	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.000.000		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Temang gung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	dokumen	1.000.000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Teman ggung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	dokumen	1.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					8.900.434.784		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					8.900.434.784	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temang gung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90	Orang	8.900.434.784		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Teman ggung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90	Orang	8.900.434.784	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					200.000.000		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					200.000.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Kab. Temang gung	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang- undangan	200	Orang	200.000.000		Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Kab. Teman ggung	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang- undangan	200	Orang	200.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ketera ngan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					240.100.000		Administrasi Umum Perangkat Daerah					240.100.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Temang gung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	4.500.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Teman ggung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	4.500.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temang gung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	128.600.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Teman ggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	128.600.000	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Temang gung	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan	47.000.000		Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Teman ggung	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan	47.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temang gung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	60.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Teman ggung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	60.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.629.026.278		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.629.026.278	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Temang gung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	731.500.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Teman ggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	731.500.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Temang gung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	3.897.526.278		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Teman ggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	3.897.526.278	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan					475.381.250		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan					475.381.250	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Temanggung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	Unit	73.743.750
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Temanggung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	43	Unit	329.637.500
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	Unit	10.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	62.000.000
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kab. Temanggung	Persentase koperasi yang dilakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan	21,25	%	75.000.000,00

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pemerintahan Daerah						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Temanggung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	Unit	73.743.750	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Temanggung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	43	Unit	329.637.500	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	Unit	10.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	62.000.000	
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kab. Temanggung	Persentase koperasi yang dilakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan	21,25	%	75.000.000,00	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota					75.000.000,00
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Temang gung	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	20	Koperasi	75.000.000,00
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kab. Temang gung	Persentase pendidikan dan pelatihan koperasi	15,15	%	100.000.000
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota					100.000.000
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Temang gung	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	15	Orang	100.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ketera ngan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota					75.000.000,00	
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Teman ggung	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	20	Koperasi	75.000.000,00	
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kab. Teman ggung	Persentase pendidikan dan pelatihan koperasi	15,15	%	100.000.000	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota					100.000.000	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Teman ggung	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	15	Orang	100.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kab. Temang gung	Persentase Jumlah Pelaku usaha mirkro yang mendapat fasilitasi, pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	0,38	%	145.000.000
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan					145.000.000
	Perkuatan Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM	Kab. Temang gung	Jumlah Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM	1	Lembaga	50.000.000
	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	Kab. Temang gung	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	70	Orang	75.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ketera ngan
1	2	3	4	5	6	7	8
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kab. Teman ggung	Persentase Jumlah Pelaku usaha mirko yang mendapat fasilitasi, pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	0,38	%	145.000.000	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan					145.000.000	
	Perkuatan Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM	Kab. Teman ggung	Jumlah Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM	1	Lembaga	50.000.000	
	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	Kab. Teman ggung	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	70	Orang	75.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM	Kab. Temang gung	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perizinan Berusaha	30	Unit Usaha	20.000.000
B	URUSAN PERDAGANGAN					1.843.564.375
5	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kab. Temang gung	Persentase Pasar Dalam Kondisi Baik / Cukup Baik Persentase Pelaku Usaha Informal Persentase Pedagang yang menggunakan Transaksi Digital	83,00 6,85 2,40	%	1.663.564.375
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan					1.652.264.375
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Temang gung	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	6	pasar	1.652.264.375
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya					11.300.000
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Temang gung	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	1	Dokumen	11.300.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM	Kab. Temang gung	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perizinan Berusaha	30	Unit Usaha	20.000.000	
B	URUSAN PERDAGANGAN					1.843.564.375	
5	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kab. Temang gung	Persentase Pasar Dalam Kondisi Baik / Cukup Baik Persentase Pelaku Usaha Informal Persentase Pedagang yang menggunakan Transaksi Digital	83,00 6,85 2,40	%	1.663.564.375	
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan					1.652.264.375	
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Temang gung	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	6	pasar	1.652.264.375	
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya					11.300.000	
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Temang gung	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	1	Dokumen	11.300.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
6	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Kab. Temang gung	Persentase Ketersediaan Informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	90	%	50.000.000
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota					40.000.000
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Temang gung	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	365	Laporan	40.000.000
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					10.000.000
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Temang gung	Jumlah laporan pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi dengan realisasi minimal 90 %	12	Laporan	10.000.000
7	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Kab. Temang gung	Nilai Ekspor	131.327.193	US \$	100.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ketera ngan
1	2	3	4	5	6	7	8
6	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Kab. Teman ggung	Persentase Ketersediaan Informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	90	%	50.000.000	
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota					40.000.000	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Teman ggung	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	365	Laporan	40.000.000	
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					10.000.000	
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Teman ggung	Jumlah laporan pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi dengan realisasi minimal 90 %	12	Laporan	10.000.000	
7	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Kab. Teman ggung	Nilai Ekspor	131.327.193	US \$	100.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ketera ngan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					100.000.000		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					100.000.000	
	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Kab. Temang gung	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	2	Pelaku Usaha	100.000.000		Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Kab. Teman ggung	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	2	Pelaku Usaha	100.000.000	
8	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Kab. Temang gung	Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang	95	%	30.000.000	8	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Kab. Teman ggung	Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang	95	%	30.000.000	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan					30.000.000		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan					30.000.000	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Temang gung	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	5700	Unit	30.000.000		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Teman ggung	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	5700	Unit	30.000.000	
	JUMLAH					16.609.506.687		JUMLAH					16.609.506.687	

Sumber : Dinkopdag Kabupaten Temanggung, 2026

2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Tahun 2027, Dinkopdag Kabupaten Temanggung tidak memperoleh usulan program dan kegiatan masyarakat (NIHIL).

2.7. Inovasi Perangkat Daerah

Inovasi perangkat daerah dilakukan sebagai upaya memberikan pelayanan kepada Masyarakat. Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan ada 1 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6
Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2024-2026

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1	Dolan Ning Pasar Lor	Dinkopdag, UPTD Pengelolaan Pasar Daerah Temanggung, UMKM Rumah Batik Temanggung, Komunitas Sejarah Temanggung, Sanggar Seni Sekar Jagad Temanggung, Komunitas Pelukis Paron	-	Pasar Lor menjadi ruang aktivitas kreatif yang melibatkan masyarakat luas melalui kegiatan tematik dan publikasi digital. Rangkaian kegiatan Dolan Ning Pasar Lor meliputi : 1. Cuci gudang 2. Festival makanan tradisional 3. Pameran 4. Lomba fotografi untuk umum minimal berusia 13 tahun, 5. Lomba mewarnai untuk TK dan PAUD, 6. Lomba gerak lagu untuk TK dan PAUD 7. Edukasi wisata untuk SD 8. Jelajah sejarah untuk umum	Terselenggaranya kegiatan Dolan Ning Pasar Lor di Pasar Kliwon Temanggung, tersedianya konten promosi digital, dikenalnya Pasar Tradisional oleh generasi muda (siswa-siswi sekolah TK, SD, SMP dan SMA) serta meningkatnya partisipasi pedagang dan pengunjung pasar	Meningkatkan transaksi dan pendapatan pedagang pasar, memperkuat interaksi sosial masyarakat, mengenalkan lebih dalam Pasar Tradisional kepada Generasi Muda di era digital, serta meningkatkan eksistensi pasar tradisional melalui media digital.	Dinkopdag (UPTD Pengelolaan Pasar Daerah Temanggung) - 2025

Sumber : Dinkopdag Kabupaten Temanggung, 2026

2.8. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan ada 1 penghargaan, yaitu:

Tabel 2.7
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2024-2026

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Pemnghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	Penghargaan Pasar Tertib Ukur Tahun 2024	Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Nasional	Dinkopdag

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan 2025-2029 adalah "Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui sektor koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan" dengan sasaran yang akan dicapai adalah "Meningkatnya Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB, Meningkatkan Jumlah Wirausaha di Daerah, dan Meningkatkan Nilai Usaha Perdagangan". Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, maka untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diperlukan:

1. Dukungan kesesuaian program dan kegiatan yang disusun dalam Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan .
2. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2027 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
3. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung pada Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2027

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan Target	Target Tahun 2027	Target Kondisi Akhir 2029
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sektor Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan			Rasio PDRB Sektor Perdagangan	%	20,98	20,94
	Meningkatnya Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB		Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	%	1,89	2,01
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Yang Dilakukan Pengawasan, Pemeriksaan Dan Pembinaan	%	21,25	37,25
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Pendidikan Dan Pelatihan Koperasi	%	15,15	17,50
	Meningkatnya Jumlah Wirausaha Di Daerah		Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3,28	3,49
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Jumlah Pelaku Usaha Mikro Yang Mendapat Fasilitas, Pendampingan Usaha, Kemitraan Usaha, Pengembangan Kelembagaan, Akses Pembiayaan	%	0,38	0,47
	Meningkatnya Nilai Usaha Perdagangan		Disparitas Harga	%	±10	±10
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar Daerah Dalam Kondisi Baik/Cukup Baik	%	83	83
			Persentase Pedagang Yang Menggunakan Transaksi Digital	%	2,4	3,2

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan Target	Target Tahun 2027	Target Kondisi Akhir 2029
1	2	3	4	5	6	7
			Persentase Pelaku Usaha Informal Yang Difasilitasi	%	6,85	6,85
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Ketersediaan Informasi Harga Bahan Pokok Dan Barang Penting	%	90	90
		Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor	Us\$	131.327.193	142.043.492
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Cakupan Alat Ukur, Takar Timbang Dan Perlengkapannya (Uttp) Yang Ditera Ulang	%	95	95

Sumber : Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kab. Temanggung Tahun 2025-2029.

Kebijakan dan strategi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung di Tahun 2027 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2025-2029. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2025-2029.

3.3. Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Secara umum, rekapitulasi program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung meliputi:

1. Jumlah Program dan Kegiatan

Pada periode Renja Tahun 2027 direncanakan sebanyak 9 (sembilan) program, yang dijabarkan dalam 16 (enam belas) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan sesuai dengan kewenangan perangkat daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan dilaksanakan dengan cakupan pelayanan di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung. Sebagian kegiatan bersifat kabupaten, seperti perumusan kebijakan, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, dan pelayanan administrasi. Sementara itu, kegiatan yang bersifat operasional dilaksanakan tersebar sesuai kebutuhan dan potensi wilayah, antara lain pada koperasi, pelaku UMKM, pasar rakyat, serta lokasi perdagangan yang menjadi sasaran pembinaan, pengawasan, dan pemberdayaan.

3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Total kebutuhan pendanaan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Renja Tahun 2027 sebesar Rp. 16.959.506.687,00 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung (termasuk dari DBCHT sebesar Rp. 200.000.000,00).

Selanjutnya, rincian program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target, lokasi, kelompok sasaran, dan kebutuhan pendanaan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2027

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
							NASIONAL	DAERAH				
(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan			16.959.506.687,00							18.572.400.269,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			14.815.942.312,00							16.288.513.768,00	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			14.815.942.312,00							16.288.513.768,00	
2.17.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			14.445.942.312,00							14.310.756.582,00	
		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100 %	14.445.942.312,00						100 %	14.290.756.582,00	
2.17.01 .2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.000.000,00					Perangkat Daerah		1.000.000,00	
	-			1.000.000,00					Perangkat Daerah		1.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
							NASIONAL	DAERAH				
(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
2.17.01 .2.01.0 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1.000.000,00							1.000.000,00	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Temang gung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		7 Dokumen	1.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdaganga n
2.17.01 .2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.900.434.784,00					Pegawai		8.222.756.582,00	
	-			8.900.434.784,00					Pegawai		8.222.756.582,00	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	8.900.434.784,00						-	8.222.756.582,00	
2.17.01 .2.02.0 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			8.900.434.784,00							8.222.756.582,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
							NASIONAL	DAERAH				
(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/bulan	8.900.434.784,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		90 Orang/bulan	8.222.756.582,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			200.000.000,00					Pelaku UMKM		200.000.000,00	
	-			200.000.000,00					Pelaku UMKM		200.000.000,00	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	200.000.000,00						-	200.000.000,00	
2.17.01.2.05.010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			200.000.000,00							200.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
							NASIONAL	DAERAH				
(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	200.000.000,00	Kab. Temanggun	DBH Cukai Hasil Tembaku (CHT)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		150 Orang	200.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2.17.01 .2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			240.100.000,00					Pegawai		400.000.000,00	
	-			240.100.000,00					Pegawai		400.000.000,00	
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	47.000.000,00						-	70.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	60.000.000,00						-	125.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	128.600.000,00						-	185.000.000,00	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga	-	4.500.000,00						-	20.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
							NASIONAL	DAERAH				
(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		n Bangunan Kantor yang Disediakan										
2.17.01 .2.06.0 001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			4.500.000,00							20.000.000,00	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4.500.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		12 Paket	20.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2.17.01 .2.06.0 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			128.600.000,00							185.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
							NASIONAL	DAERAH				
(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	128.600.000,00	Kab. Temanggun g	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		12 Paket	185.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2.17.01 .2.06.0 008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			47.000.000,00							70.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
							NASIONAL	DAERAH				
(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	47.000.000,00	Kab. Temangung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		12 Laporan	70.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2.17.01 2.06.0 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			60.000.000,00							125.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
							NASIONAL	DAERAH				
(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	60.000.000,00	Kab. Temanggun	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		12 Laporan	125.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2.17.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.629.026.278,00					Pegawai		4.797.000.000,00	
	-			4.629.026.278,00					Pegawai		4.797.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	731.500.000,00						-	850.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	3.897.526.278,00						-	3.947.000.000,00	
2.17.01 .2.08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			731.500.000,00							850.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
							NASIONAL	DAERAH				
(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	731.500.000,00	Kab. Temanggun g	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		12 Laporan	850.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2.17.01 .2.08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3.897.526.278,00							3.947.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
							NASIONAL	DAERAH				
(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.897.526.278,00	Kab. Temanggun	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		12 Laporan	3.947.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2.17.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			475.381.250,00					Pegawai		690.000.000,00	
	-			475.381.250,00					Pegawai		690.000.000,00	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	62.000.000,00						-	120.000.000,00	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	329.637.500,00						-	450.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
							NASIONAL	DAERAH				
(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	73.743.750,00						-	100.000.000,00	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	10.000.000,00						-	20.000.000,00	
2.17.01 .2.09.0 001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			73.743.750,00							100.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	73.743.750,00	Kab. Temanggun	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		2 Unit	100.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
							NASIONAL	DAERAH				
(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.17.01 .2.09.0 002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			329.637.500,00							450.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	43 Unit	329.637.500,00	Kab. Temangg ung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		43 Unit	450.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdaganga n
2.17.01 .2.09.0 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			10.000.000,00							20.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
							NASIONAL	DAERAH				
(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	10.000.000,00	Kab. Temanggun	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		12 Unit	20.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2.17.01 2.09.0 009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			62.000.000,00							120.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
							NASIONAL	DAERAH				
(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	62.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		1 Unit	120.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			75.000.000,00							25.365.243,00	
		Persentase koperasi yang dilakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan	21,25 %	75.000.000,00						27,27%	25.365.243,00	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			75.000.000,00					Koperasi di Kabupaten Temanggung		25.365.243,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
							NASIONAL	DAERAH				
(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	-			75.000.000,00					Koperasi di Kabupaten Temanggung		25.365.243,00	
		Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	-	75.000.000,00						-	25.365.243,00	
2.17.03 .2.01.0 004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota			75.000.000,00							25.365.243,00	
	Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	20 Unit Usaha	75.000.000,00	Kab. Temangg ung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		25 Koperasi	25.365.243,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdaganga n

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
							NASIONAL	DAERAH				
(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			98.750.000,00							50.730.487,00	
		Persentase pendidikan dan pelatihan koperasi	15,15 %	98.750.000,00						16,50%	50.730.487,00	
2.17.05 .2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			98.750.000,00					Koperasi di Kabupaten Temanggung		50.730.487,00	
	-			98.750.000,00					Koperasi di Kabupaten Temanggung		50.730.487,00	
		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	-	98.750.000,00						-	50.730.487,00	
2.17.05 .2.01.0 001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi			98.750.000,00							50.730.487,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
							NASIONAL	DAERAH				
(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	15 Orang	98.750.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		20 Orang	50.730.487,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			1.250.000,00							0,00	
		-	-	1.250.000,00						-	0,00	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.250.000,00					Koperasi di Kabupaten Temanggung		0,00	
	-			1.250.000,00					Koperasi di Kabupaten Temanggung		0,00	
		Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	-	1.250.000,00						-	0,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
							NASIONAL	DAERAH				
(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.17.06 .2.01.0 009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota			1.250.000,00							0,00	
	Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	150 Unit Usaha	1.250.000,00	Kab. Temang gung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		200 Unit Usaha	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdaganga n
2.17.0 7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			195.000.000,00							1.901.661.456,00	
		Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi, pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan	0,38 %	175.000.000,00						0,42%	1.901.661.456,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
							NASIONAL	DAERAH				
(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		kelembagaan, akses pembiayaan										
2.17.07 .2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			195.000.000,00					Pengusaha Mikro Kabupaten Temanggung		1.901.661.456,00	
	-			195.000.000,00					Pengusaha Mikro Kabupaten Temanggung		1.901.661.456,00	
		Jumlah Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM	-	28.000.000,00						-	300.000.000,00	
		Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	-	105.000.000,00						-	815.000.000,00	
		Jumlah Pelaku Usaha yang terfasilitasi Pembentukan Badan Hukum Berusaha	-	20.000.000,00						-	0,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
							NASIONAL	DAERAH				
(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	-	22.000.000,00						-	0,00	
		Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perizinan Berusaha	-	20.000.000,00						-	786.661.456,00	
2.17.07 .2.01.0 016	Perkuatan Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM			28.000.000,00							300.000.000,00	
	Terfasilitasinya perkuatan Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM	Jumlah Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM	1 Lembaga	28.000.000,00	Kab. Temanggun g	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		1 Lembaga	300.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
							NASIONAL	DAERAH				
(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.17.07 .2.01.0 018	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha			105.000.000,00							815.000.000,00	
	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	70 Orang	105.000.000,00	Kab. Temang gung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		70 Orang	815.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdaganga n
2.17.07 .2.01.0 021	Pembinaan dan Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha			20.000.000,00							0,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
							NASIONAL	DAERAH				
(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha	Jumlah Pelaku Usaha yang terfasilitasi Pembentukan Badan Hukum Berusaha	10 Orang	20.000.000,00	Kab. Temang- ung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		15 Orang	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2.17.07 .2.01.0 022	Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM			20.000.000,00							786.661.456,00	
	Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perizinan Berusaha	30 Unit Usaha	20.000.000,00	Kab. Temang- ung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		30 Unit Usaha	786.661.456,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
							NASIONAL	DAERAH				
(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.17.07 .2.01.0 027	Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk			22.000.000,00							0,00	
	Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi UMKM dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	35 Unit Usaha	22.000.000,00	Kab. Temanggun	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		40 Unit Usaha	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			2.143.564.375,00							2.283.886.501,00	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			2.143.564.375,00							2.283.886.501,00	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			1.963.564.375,00							1.964.284.437,00	
		Persentase Pasar Dalam Kondisi Baik / Cukup Baik	83,00 %	11.300.000,00						83,00 %	25.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
							NASIONAL	DAERAH				
(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase Pasar Dalam Kondisi Baik / Cukup Baik	83,00 %	1.952.264.375,00						83,00 %	1.939.284.437,00	
		Persentase Pedagang yang menggunakan Transaksi Digital	2,40 %	1.963.564.375,00						2,80%	1.964.284.437,00	
		Persentase Pelaku Usaha Informal	6,85 %	11.300.000,00						6,85 %	25.000.000,00	
		Persentase Pelaku Usaha Informal	6,85 %	1.952.264.375,00						6,85 %	1.939.284.437,00	
3.30.03 .2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			1.952.264.375,00					Pasar Daerah		1.939.284.437,00	
	-			1.952.264.375,00					Pasar Daerah		1.939.284.437,00	
		Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	1.952.264.375,00						-	1.939.284.437,00	
3.30.03 .2.01.0 002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			1.952.264.375,00							1.939.284.437,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
							NASIONAL	DAERAH				
(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Tersedianya Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	6 Unit	1.952.264.375,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		6 Unit	1.939.284.437,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
3.30.03 .2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			11.300.000,00					Pelaku Usaha Informal		25.000.000,00	
	-			11.300.000,00					Pelaku Usaha Informal		25.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	-	11.300.000,00						-	25.000.000,00	
3.30.03 .2.02.0 001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			11.300.000,00							25.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
							NASIONAL	DAERAH				
(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	11.300.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		1 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			50.000.000,00							81.168.778,00	
		Persentase Ketersediaan Informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	90 %	50.000.000,00						90 %	81.168.778,00	
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			40.000.000,00					Masyarakat		60.000.000,00	
	-			40.000.000,00					Masyarakat		60.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
							NASIONAL	DAERAH				
(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	-	40.000.000,00						-	60.000.000,00	
3.30.04 .2.02.0 002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			40.000.000,00							60.000.000,00	
	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	365 Laporan	40.000.000,00	Kab. Temang gung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		365 Laporan	60.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdaganga n

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
							NASIONAL	DAERAH				
(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.30.04 .2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			10.000.000,00					Masyarakat		21.168.778,00	
	-			10.000.000,00					Masyarakat		21.168.778,00	
		Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	-	10.000.000,00						-	21.168.778,00	
3.30.04 .2.03.0 003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi			10.000.000,00							21.168.778,00	
	Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Temang gung	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		12 Laporan	21.168.778,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdaganga n
3.30.0 5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			100.000.000,00							202.921.946,00	
		Nilai Ekspor	131327193 US \$	100.000.000,00						1365802 81 US \$	202.921.946,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
							NASIONAL	DAERAH				
(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.30.05 .2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			100.000.000,00					Pelaku Usaha		202.921.946,00	
	-			100.000.000,00					Pelaku Usaha		202.921.946,00	
		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	-	100.000.000,00						-	202.921.946,00	
3.30.05 .2.01.0 004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan			100.000.000,00							202.921.946,00	
	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	2 Pelaku Usaha	100.000.000,00	Kab. Temanggun g	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		2 Pelaku Usaha	202.921.946,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
3.30.0 6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			30.000.000,00							35.511.340,00	
		Cakupan alat ukur takar timbang dan	95 %	30.000.000,00						95 %	35.511.340,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
							NASIONAL	DAERAH				
(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		perlengkapannya yang ditera ulang										
3.30.06 .2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			30.000.000,00					Wajib tera		35.511.340,00	
	-			30.000.000,00					Wajib tera		35.511.340,00	
		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	-	30.000.000,00						-	35.511.340,00	
3.30.06 .2.01.0 001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang			30.000.000,00							35.511.340,00	
	Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	5700 Unit	30.000.000,00	Kab. Temangg ung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		5700 Unit	35.511.340,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdaganga n
J U M L A H				16.959.506.687,00							18.572.400.269,00	

Sumber : SIPD RI Kab. Temanggung Tahun 2027.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung di Tahun 2027 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2027 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2027 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan terjadi pada sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan; sub kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha; sub kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha; dan sub kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2027 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
 Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2027

	RANCANGAN RENJA DINKOPDAG TAHUN 2027			RKPD DINKOPDAG TAHUN 2027		(+/-)
No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)
A	URUSAN KOPERASI DAN UMKM	14.765.942.312	A	URUSAN KOPERASI DAN UMKM	14.815.942.312	50.000.000
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.445.942.312	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.445.942.312	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.900.434.784		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.900.434.784	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.900.434.784		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.900.434.784	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200.000.000		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200.000.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	240.100.000		Administrasi Umum Perangkat Daerah	240.100.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.500.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.500.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	128.600.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	128.600.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	47.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	47.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.629.026.278		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.629.026.278	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	731.500.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	731.500.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.897.526.278		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.897.526.278	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	475.381.250		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	475.381.250	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73.743.750		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73.743.750	

RANCANGAN RENJA DINKOPDAG TAHUN 2027		
No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	329.637.500
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	62.000.000
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	75.000.000,00
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	75.000.000,00
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000,00
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	100.000.000
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	100.000.000
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	145.000.000
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	145.000.000

RKPD DINKOPDAG TAHUN 2027			(+/-)
No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	329.637.500	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	62.000.000	
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	75.000.000	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	75.000.000	
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	98.750.000	- 1.250.000
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	98.750.000	- 1.250.000
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	98.750.000	- 1.250.000
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1.250.000	1.250.000
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.250.000	+1.250.000
	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	1.250.000	+1.250.000
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	195.000.000	50.000.000
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	195.000.000	50.000.000

RANCANGAN RENJA DINKOPDAG TAHUN 2027		
No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
	Perkuatan Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM	50000000
	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	75000000
	Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM	20000000
B	URUSAN PERDAGANGAN	1.843.564.375
5	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.663.564.375
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.652.264.375
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.652.264.375
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	11.300.000
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	11300000
6	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	50.000.000
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	40.000.000
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	40.000.000
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	10.000.000
7	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	100.000.000

RKPD DINKOPDAG TAHUN 2027			(+/-)
No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)
	Perkuatan Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM	28.000.000	- 22.000.000
	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	105.000.000	+ 50.000.000 - 20.000.000
	Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM	20.000.000	
	Pembinaan dan Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha	20.000.000	+ 20.000.000
	Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk	22.000.000	+ 22.000.000
B	URUSAN PERDAGANGAN	2.143.564.375	300.000.000
5	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.963.564.375	300.000.000
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.952.264.375	300.000.000
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.952.264.375	+ 300.000.000
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	11.300.000	
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	11300000	
6	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	50.000.000	
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	40.000.000	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	40.000.000	
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	10.000.000	
7	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	100.000.000	

RANCANGAN RENJA DINKOPDAG TAHUN 2027		
No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000
	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	100.000.000
8	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	30.000.000
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	30.000.000
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	30.000.000
	JUMLAH	16.609.506.687

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temanggung Tahun 2027

RKPD DINKOPDAG TAHUN 2027			(+/-)
No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	
	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	100.000.000	
8	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	30.000.000	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	30.000.000	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	30.000.000	
	JUMLAH	16.959.506.687	350.000.000

Dari Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan/penurunan pagu indikatif Tahun 2027 sebesar Rp. 350.000.000,00. Kenaikan/penurunan tersebut dikarenakan :

- a) Penambahan anggaran pada sub kegiatan Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan sebanyak Rp. 300.000.000,00 yang akan digunakan untuk Pemeliharaan Gedung Pasar Ngadirejo
- b) Penambahan anggaran pada sub Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha sebanyak Rp. 50.000.000,00 yang akan digunakan untuk fasilitasi layanan kemasan bagi UMKM
- c) Pergeseran anggaran pada sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi sebanyak Rp. 1.250.000,00 digeser ke sub kegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (memunculkan program baru yaitu Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi) untuk mengakomodir kegiatan arahan pemerintah pusat
- d) Pergeseran anggaran pada sub kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha sebanyak Rp. 20.000.000,00 digeser ke sub kegiatan Pembinaan dan Fasilitas Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha untuk mengakomodir kegiatan arahan pemerintah pusat
- e) Pergeseran anggaran pada sub kegiatan Perkuatan Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM sebanyak Rp. 22.000.000,00 digeser ke sub kegiatan Pembinaan dan Fasilitas Sertifikasi dan Standardisasi Produk untuk mengakomodir kegiatan arahan pemerintah pusat

BAB V

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan suatu instansi atau organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis operasionalnya. IKU menjadi prioritas utama untuk mengetahui dan meningkatkan kinerja serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun evaluasi hasil renja 2025 dan target IKU tahun 2027 sebagai berikut:

Tabel 5.1
Indikator Kinerja Utama Tahun 2027

NO	INDIKATOR	SATUAN	EVALUASI HASIL RENJA 2025 (realisasi)	TARGET TAHUN 2027	KETERANGAN
V	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH				
	Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar				
16	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
1	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	%	1,44	1,89	DINKOPDAG
2	Rasio Kewirausahaan daerah	%	2,43	3,28	DINKOPDAG
	Urusan Pemerintahan Pilihan				
27	Perdagangan				
1	Rasio PDRB sektor perdagangan	%	21,05	20,98	DINKOPDAG
2	Disparitas Harga	%	0,30	±10	DINKOPDAG

Sumber : Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kab. Temanggung Tahun 2025-2029.

5.2. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian kinerja program pada tingkat pemerintah pusat atau daerah. Indikator ini merupakan ukuran kinerja yang paling strategis, kritis, dan mewakili esensi dari suatu program sehingga dapat mencerminkan apakah program tersebut berjalan efektif. Indikator Kinerja Kunci Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.2
Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	EVALUASI HASIL RENJA 2025 (realisasi)	TARGET 2027	SUMBER DATA
1	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	67	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset (jumlah koperasi sehat)	%	Indikator lama (tidak digunakan)	14,38	
				Jumlah seluruh koperasi				
		68	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	Indikator lama (tidak digunakan)	0,80	
				Jumlah usaha mikro keseluruhan				
			Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Jumlah volume usaha koperasi tahun berjalan – jumlah volume usaha koperasi tahun sebelumnya	%	4,94	Indikator baru sehingga target belum ada di RPJMD	DINKOPDAG
				Jumlah volume usaha koperasi tahun sebelumnya				
			Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Jumlah usaha mikro yang memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)	%	83,03	Indikator baru sehingga target belum ada di RPJMD	DINKOPDAG
				Jumlah usaha mikro				
2	Perdagangan	88	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan	%	DPMPTSP	0,15	DPMPTSP dan DINKOPDAG
				Jumlah pelaku usaha di wilayah Kabupaten		33.835		
		89	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP Bertanda Tera yang berlaku pada tahun berjalan	%	88,85	95	DINKOPDAG
				Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten				

Sumber : Dinkopdag Kabupaten Temanggung, 2026.

BAB VI

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2027 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2027 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2027 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2027. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2027 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2027 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri dari Belanja Operasional sebesar 93,85 % dan realisasi Belanja Modal sebesar 98,99 %, sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2026 sampai dengan Triwulan I terdiri dari Belanja Operasional sebesar 23,57% dan realisasi Belanja Modal masih 0% (belum terlaksana).

Dalam Renja Tahun Anggaran 2027 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 16.959.506.687,00 yang terdiri dari 9 (sembilan) program antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota; Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi; Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian; Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi; Program Pemberdayaan Usaha Menengah; Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM); Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan; Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting; Program Pengembangan Ekspor; dan Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2027 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 20 Juli 2026

Plt. KEPALA DINKOPDAG
KABUPATEN TEMANGGUNG,



MANDA KARTIKO, S.STP, M.Kom
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197904121997111002